



Imam-Fadli Tuntut Coblos Ulang

YOGYAKARTA – Tim pemenangan paslon nomor urut 1 dalam Pilwali Kota Yogyakarta 2017, Imam Priyono-Achmad Fadli, bakal menuntut pemungutan suara ulang jika tuntutan mereka membuka surat suara tidak sah tetap tidak diakomodir KPU setempat.

Bahkan, tim pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 juga siap membawa persoalan ini hingga Mahkamah Konstitusi (MK). "Sampai perhitungan akhir, kalau masih belum dikabulkan juga kami akan menuntut pemungutan suara ulang. Kami menilai surat suara tidak sah yang mencapai 14.000 ribulebih itu jangan untuk di Kota Yogyakarta," ucap Ketua Tim Pemenangan Paslon 1, Danang Rudyatmoko, kemarin.

Danang menegaskan, pihaknya akan mengidentifikasi secara menyeluruh dengan mengumpulkan seluruh saksi yang bertugas saat pencoblosan. Para saksi dikumpulkan di Kantor DPD PDIP DIY untuk memastikan apa yang terjadi pada saat pencoblosan dan perhitungan surat suara.

"Kami identifikasi semua saksi, mungkin karena ketiddatahuannya, sehingga melakukan proses normatif. Semuanya kami identifikasi. Ada apa, kejanggalan apa, dan seterusnya. Seperti kemarin, kami sebenarnya tidak tahu persis berapa jumlah surat suara rusak tapi oleh penyelenggara langsung diproteksi," katanya.

Jika tuntutan untuk membuka surat suara tidak sah dituruti, maka hasilnya tidak jadi persoalan. Namun jika tetap ditolak, pihaknya menyia-kan tuntutan untuk pemungutan suara ulang, termasuk kemungkinan membawa persoalan ini ke MK. "Ada kemungkinan ke MK," kata Danang.

Aries Surya, anggota tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP mengklaim, pelanggaran pada Pilwali Kota Yogyakarta 2017 sudah terjadi sejak masa kampanye, masa tenang dengan adanya intimidasi dan kekerasan. Bahkan saat pemungutan suara. Di mana banyak warga yang memiliki hak pilih tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Hal 11

Imam-Fadli Tuntut Coblos Ulang

((dari Hal 1

Pelanggaran masih berlanjut setelah pemungutan suara usai yakni saat rekapitulasi mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi beberapa data, termasuk *real count* KPU dengan hasil rekapitulasi di 14 kecamatan. Kedua data tersebut memiliki perbedaan signifikan. "Kami sangat berharap KPU memiliki integritas dan meluruskan semua kesalahan. Kalau tidak akan kami laporkan ke Panwas. Kami juga akan advokasi baik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun MK," kata Aries.

Sementara Tanto Kusuma, tim pendampingan DPP PDIP menambahkan, pihaknya menyangkan integritas penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta. Pihaknya juga telah merekomendasikan DPC PDIP Kota Yogyakarta untuk melaporkan kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu baik Panwas maupun KPU.

Terpisah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Muhammad Najib mengatakan, proses penghitungan ulang dengan cara membuka surat suara hasil pemungutan di TPS hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pilkada. Yakni, terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang dite-

rima PPS dari TPS, saksi pasung calon tingkat kecamatan dan saksi calon di TPS, Panwas Kecamatan atau PPL, maka PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. "Itu amanat UU Pilkada, ada di Pasal 118. Jadi syaratnya harus ada pihak yang meminta atau mengajukan keberatan saat tahapan masih di TPS. Hitung ulang harus dilakukan pada hari yang sama saat proses pemungutan suara," paparnya.

Ketua Panwas Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengungkapkan, tak ada perbedaan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Sehingga dari total 794 TPS, tak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan usai proses penghitungan di tiap TPS. "Di sejumlah PPK (tingkat kecamatan) kemarin memang sempat diwarnai pembukaan surat suara tidak sah atau rusak secara sampling. Itu semata-mata untuk akuntabilitas dan transparansi," katanya.

Tahapan saat ini hanya tinggal menunggu jadwal untuk proses rekapitulasi suara manual di KPU pada 23-24 Februari mendatang. Terkait permintaan pemungutan suara ulang (PSU), Komisiner Bawaslu DIY Divisi Penindakan Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, hal itu harus memenuhi syarat sesuai Pasal 112 UU Pilkada. Di antaranya, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan UU. Ke-

mudian KPSP meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

Lalu KPSP merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih sehingga menjadi tidak sah. Ada lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau berbeda. Selain itu ada lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. "Rekomendasi pemungutan suara ulang itu dari Panwas setelah melalui kajian. Dasar kajiannya Pasal 112 tersebut," kata Rahayu.

Atau karena alasan kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilakukan. "Penyampaian rekomendasi PSU diatur di PKPU 10/2015 Pasal 60, yaitu maksimal dua hari setelah pemungutan suara," katanya.

Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto sendiri kembali menegaskan, jajarannya bekerja secara profesional dan transparan. Apalagi KPU juga belum mengumumkan hasil perolehan suara dengan tahapan berjenjang sesuai aturan perundangan.

Sekadar informasi, konstelasi politik usai pemungutan suara Pilwali Kota Yogyakarta pada 15 Februari lalu memicu panasnya perpolitikan di kota

ini. Meski sebelumnya Raja Keraton Yogyakarta, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, dan kalangan akademisi angkat bicara untuk meredakan suhu politik, kenyataannya hal ini belum membuahkan hasil.

Sikap kubu kedua paslon, Imam Priyono-Achmad Fadli dan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, yang saling mengklaim kemenangan dan melontarkan tuduhan tindak kecurangan menjadi pemicu memanasi situasi politik dan sosial masyarakat. "Dari pemberitaan di sejumlah media, beredar kabar tidak mengenakkan yang mengindikasikan ketidakdewasaan dari pihak pendukung paslon," kata Anang Amiruddin Nugroho, Ketua Umum Pena Muda Yogyakarta, kemarin.

Kelompok yang berisikan kalangan intelektual muda dan akademisi bergelar sarjana dan magister berbagai perguruan tinggi itu, meminta agar semua lapisan masyarakat percaya dan yakin sepenuhnya kepada KPU Kota Yogyakarta. Menurut dia, KPU merupakan lembaga resmi pemerintah yang memiliki integritas dan kapabilitas sebagai penyelenggara Pilwali 2017.

Karena itu dibutuhkan kedewasaan berpikir dan kejeranian hati guna menyikapi segala polemik, sekaligus menjadi langkah awal mencari solusi untuk permasalahan ini. "Mari kita bersama-sama menunggu hasil resmi dari KPU dengan kepala dingin demi masa depan Kota Yogyakarta yang kita cini-

tai,"ujarnya.

Anang juga mengimbau kepada pendukung masing-masing paslon untuk bersikap arif dalam mendukung paslonnya dengan menekankan semboyan Yogyakarta Berhati Nyaman. Ini demi terciptanya suasana Kota Yogyakarta yang aman dan damai tanpa adanya unsur premanisme. "Masyarakat Kota Yogyakarta juga jangan terkecoh dengan hasil survei abal-abal yang dilakukan oleh oknum sembarang untuk membangun persepsi kemenangan paslon tertentu," katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan laman resmi KPU, dari hasil pemilihan 794 TPS didapati paslon nomor urut 1 meraih 99.143 atau 49,70% suara. Sementara paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi meraih 100.332 suara (50,30%). Data ini sendiri belum dinyatakan resmi karena belum dihitung secara manual oleh KPU Kota Yogyakarta.

Data hanya berdasarkan scan formulir C1 dari tiap TPS. Sementara berdasarkan penghitungan akhir yang dilakukan oleh tim DPC PDIP Kota Yogyakarta, Imam-Fadli mendapatkan 105.915 suara (51,43%). Sedangkan Haryadi-Heroe mendulang 100.027 suara atau 48,57%.

Dari kubu berseberangan, penghitungan yang dilakukan oleh tim Haryadi-Heroe di Posko Omah Putih, paslon nomor urut 2 ini meraih 99.981 suara atau 50,38%. Sementara pa-

sangan Imam-Fadli meraih 98.463 suara 49,62%.

Usai pemungutan suara, KPU Kota Yogyakarta melakukan tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan atau 14 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 16-22 Februari. Kemudian diteruskan penghitungan suara secara manual oleh KPU 23-24 Februari yang selanjutnya dilakukan pleno penetapan paslon terpilih. "Kami bekerja profesional, transparan, dan netral. Kami juga mempertanggungjawabkan kinerja kami kepada publik," kata Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyo tegas.

Tak Ada Pengamanan Khusus

Dari Gunungkidul, Polda DIY menyatakan tetap yakin tidak ada gejolak massa besar yang membutuhkan pengamanan penuh sesuai pelaksanaan Pilwali di Kota Yogyakarta. Untuk itu, tidak ada penambahan personil dalam pengamanan pilwali yang mulai diwarnai beberapa aksi yang membuat "hangat" situasi politik di Kota Yogyakarta tersebut.

Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo berlangsung lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Dia pun mengakui insiden kecil di lokasi TPS merupakan hal yang masih dalam batas wajar dan bisa diantisipasi petugas keamanan. "Di dua kabupaten baik

di Kulonprogo dan Kota Yogyakarta suasananya kondusif, tidak ada pengamanan khusus sampai nanti muncul hasil akhir," tuturnya saat kunjungan ke Mapolres Gunungkidul akhir pekan lalu.

Menurut Kapolda, permasalahan di Kecamatan Kraton merupakan hal yang biasa antarpengukung yang melihat penghitungan suara. Satu sisi pendukung meneriakkan yel-yel ini, satu pendukung lainnya meneriakkan yel-yel lainnya. "Ini bagian dari dinamika saja, tidak sampai timbul gesekan besar yang kita khawatirkan bersama. Ini bagian dinamika," ujarnya.

Namun dengan informasi selisih suara yang tipis seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta dan menjadi berita media saat ini, kapolda berharap semua pihak menahan diri. Semua proses masih harus menunggu hitungan manual dari KPU Kota Yogyakarta dan Kulonprogo. "Kami fokus mengamankan hal ini. Untuk itu, semua pihak harus membantu dengan menahan diri," ucap Ahmad Dofiri.

Untuk pengamanan sampai saat pengumuman Polda DIY masih tetap melakukan pengamanan penuh tanpa ada penguangan dan penambahan personil. Selama pilkada Polda DIY mengerahkan 2.500 pasukan, termasuk cadangan baik di mapolda maupun di masing-masing polres.

● sodik/ristu hanafi/
suharjono

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005